



LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

**Kurang Optimalnya Website Partisipasi Masyarakat dalam
Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU)**

Oleh :

NOVAL ALI MUCHTAR, S.H

NIP. 199508252018031001

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN TAHUN 2018**

Nama : Noval Ali Muchtar

NIP : 19950825 201803 1 001

**Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Pertama**

Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang

Jakarta, 28 September 2018

Mengetahui,
Coach



Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.
NIP. 19780328 201001 2 012

Menyetujui,
Mentor



Yeni Handayani, S.H., M.H.
NIP.19810929 200212 2 004

DAFTAR ISI

BAGIAN I.1 PENDAHULUAN	1
BAGIAN II. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	10
BAGIAN III. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	25
BAGIAN IV. PENUTUP.....	30
LAMPIRAN.....	33
Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	34
Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor .	38
Lampiran 3. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach ...	41
Lampiran 4. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan	44



BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Organisasi/Unit Kerja

Unit kerja penulis berada di Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU), yang menyelenggarakan Fungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 291 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan Undang-Undang;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan Undang-Undang;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan Perancangan Undang-Undang;
6. Pelaksanaan dukungan evaluasi Perancangan Undang-Undang;
7. Pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;
8. Penulisan Laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang, dan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana tercantum diatas, Pusat PUU melaksanakan dukungan Perancangan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, meliputi:

1. Penyiapan Naskah Program Legislasi Nasional;
2. Penyiapan Naskah Akademik RUU;
3. Penyiapan Penulisan RUU; dan
4. Pendampingan pembahasan RUU.

Pusat PUU memberikan dukungan penyiapan Penulisan Peraturan DPR dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD lainnya. Pusat PUU memiliki VISI dan MISI Organisasi, yaitu:

"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas"

Sedangkan MISI dari Pusat PUU adalah:

1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan
2. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

2. Jabatan Peserta

Penulis memiliki Jabatan sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama. Rincian tugas Perancang PUU Pertama sebagaimana tercantum dalam Organisasi Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan Penulisan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan RUU dan RAPERDA;
- e. Menyusun konsep instruksi;
- f. Menyusun konsep edaran;
- g. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan naskah perjanjian, persetujuan dan kontrak nasional serta internasional;

- h. Menyiapkan konsep tanggapan rancangan dalam rangka pembahasan naskah perjanjian, persetujuan dan kontrak nasional serta internasional.
- i. Menyempurnakan konsep gugatan dan jawaban konsep gugatan;
- j. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembuatan akta;
- k. Menyusun konsep Legal Opinion;
- l. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
- m. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.

Penulis memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusun bersama dengan atasan penulis, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan Penulisan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
- c. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.

3. DESKRIPSI ISU: KURANG OPTIMALNYA WEBSITE SIMAS PUU

A. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Dipilihnya Kurang Optimalnya Website Simas PUU menjadi hal yang harus segera diatasi adalah berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut:

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Tidak adanya Pengadaan Buku untuk Perancang PUU	5	3	3	11
2	Kurang optimalnya Website SIMAS PUU	4	5	4	13
3	Tidak adanya Partisipasi Masyarakat dalam Penulisan di Jurnal Prodigy	3	3	2	8

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah Isu ke-2 dengan rumusan isu Kurang Optimalnya Website SIMAS PUU

B. Deskripsi

SIMAS PUU atau Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-undang mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif melalui beberapa instrumen :

1. Penulisan database stakeholder yang meliputi data kepakaran, ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan Keahlian DPR RI.
2. Menginformasikan kepada publik rencana Penulisan Naskah Akademik dan draft RUU di Badan Keahlian DPR RI.
3. Menyampaikan masukan masyarakat secara tersistematis dan terstruktur terhadap Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan.
4. Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.
5. Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya.

C. Kondisi Masalah

Kurang optimalnya Website SIMAS PUU dapat diidentifikasi oleh beberapa macam faktor, yaitu:

1. Kurangnya mendalamnya pemahaman tentang Pengelolaan Website SIMAS PUU

Berdasarkan keterangan dari beberapa senior Perancang UU, menunjukkan bahwa pengelolaan SIMAS PUU sudah dilakukan oleh internal Perancang PUU Bersama dengan Pusat data dan informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengelolaan yang dilakukan oleh internal dan eksternal organisasi seharusnya update informasi yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat,

baik yang berhubungan dengan Naskah Akademik dan Penulisan Rancangan Undang-Undang maupun tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Tetapi berdasarkan kenyataannya, Perancang PUU jarang memperbaharui informasi dan mengupdate Website terutama bagian SIMAS PUU

2. Rendahnya aspirasi masyarakat

Rendahnya aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan gambar dibawah ini:

Tindak Lanjut

Show 10 entries

Search:

Nama	Pekerjaan	Aksi
abiezar	Peternak	Detail

Showing 1 to 1 of 1 entries

[Previous](#) 1 [Next](#)

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax 021-5715705

Gambar ini diambil dari Website SIMAS PUU, penulis mengambil sampel acak terbaru yaitu tentang Konsep awal Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan hanya satu orang masyarakat yang memberikan masukan. Rendahnya aspirasi masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari ketidaktahuan masyarakat bahwa saran dan suaranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan rujukan dalam pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sampai dengan terlalu sulitnya menyampaikan saran di Website SIMAS PUU. Dengan rendahnya aspirasi masyarakat dapat dikatakan bahwa pengelolaan Website SIMAS PUU masih belum berjalan dengan optimal dan membutuhkan perbaikan-perbaikan.

3. Kurangnya cepatnya Respon dari tim Penyusun NA dan RUU terhadap tanggapan dari masyarakat.

Pengecekan tanggapan yang masuk dari masyarakat sering kali tidak tersalurkan dengan cepat, hal ini dikarenakan karena tidak adanya pengecekan Website secara berkala terhadap produk (NA dan RUU) yang sudah di upload di Website. Permasalahan ini dapat diidentifikasi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah karena jarang dibukanya Website SIMAS PUU baik oleh user internal sehingga apabila ada tanggapan dari masyarakat penyebab tersebut tidak diketahui dan direspon secara cepat. Yang kedua adalah karena kurang adanya peran aktif dari masing-masing ketua tim untuk bertanya kepada Pengelola apakah ada tanggapan dari masyarakat yang harus di proses ke tahapan selanjutnya.

- D. Dampak yang terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan

Dampaknya dapat menyebabkan lambatnya pembaharuan isi dari SIMAS PUU serta aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Dengan adanya SIMAS PUU yang lebih dikenal, diharapkan masyarakat dalam menyampaikan saran dan masukan serta aspirasi nya secara mudah, efektif dan efisien.

Penerapan system pelayanan publik yang baik dalam mendukung pengoptimalan Website SIMAS PUU ditunjukan dengan menerapkan nilai yang mudah dan murah, aksesibel, responsif serta meningkatkan nilai partisipatif masyarakat dalam mengaspirasikan pendapatnya terhadap pembentukan NA dan RUU. Pengoptimalan Website SIMAS PUU juga bisa dilihat dari segi Komitmen Mutu yang ditunjukan dengan dapat dipercaya nya instansi Pusat PUU sebagai instansi yang akuntabel karena mendengarkan sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Website SIMAS PUU.

E. Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait

1. Whole Of Governance (WOG)

Berkoordinasi dengan instansi, pusat, atau bagian lain di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2. Manajemen ASN

Meningkatkan pemahaman internal Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam mengelola website Simas PUU

3. Pelayanan Publik

Meningkatkan dan memudahkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan, pendapat dan tanggapan tentang NA dan/atau RUU yang sedang disusun di Pusat PUU

4. Komitmen Mutu

Meningkatkan dan memperbaharui database di Simas PUU untuk informasi bagi masyarakat serta dapat merespon dengan cepat masukan dari masyarakat dan mengedepankan control dari masyarakat apabila ada ketidaksesuaian fakta yang terjadi di lapangan dengan NA dan/atau RUU yang disusun.

5. Akuntabilitas

Memberikan informasi bagi masyarakat tentang kinerja Pusat PUU dalam menjalankan Tugasnya sebagaimana amanat dari undang-undang

6. Etika Publik

Mempertanggung jawabkan serta melaksanakan fungsi ASN sebagai pelayan publik sebaik-baiknya.

F. Rumusan Isu

1. Kurangnya mendalamnya pemahaman tentang Pengelolaan Website SIMAS PUU

2. Rendahnya tanggapan dari masyarakat

3. Kurangnya cepatnya Respon dari tim Penyusun NA dan RUU terhadap tanggapan dari masyarakat.

B. Nilai-Nilai Organisasi

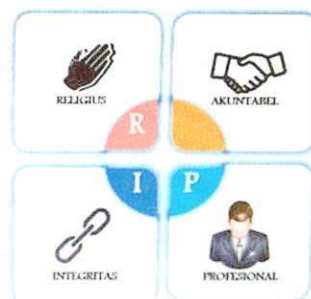
Nilai-nilai organisasi diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terdapat 4 nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai, yaitu: Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI)

KODE ETIK SETJEN DAN BK DPR RI

KODE ETIK PNS

Meningkatkan jiwa korps
Pegawai menjunjung tinggi
kehormatan serta keteladanan
sikap, tingkah laku, dan
perbuatan PNS dalam
pelaksanaan tugas sebagai
pedoman PNS dalam
pelaksanaan tugas dan pergaulan
hidup

R A P I



Sikap Religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:

1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan
3. Memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan/atau
4. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya

Sedangkan sikap profesional diwujudkan melalui tindakan:

1. Mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsive dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, dan/atau

4. Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan

Dan sikap integritas diwujudkan melalui tindakan:

1. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS
2. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Tidak merugikan orang lain dan negara
6. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan
7. Menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

C. Tujuan

Tujuan diselesaikan nya isu yang dipilih adalah untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyusunan NA dan/atau RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang. Sehingga masyarakat dapat memberikan masukan-masukan serta tanggapan terhadap penyusunan NA dan/atau RUU.

Diharapkan dengan optimalnya peran serta masyarakat, produk NA dan/atau RUU yang dihasilkan Pusat Perancangan Undang-Undang dapat lebih berkualitas dan mewakili masukan-masukan dari masyarakat secara baik dan berimbang.



BAGIAN II.

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Kurang Optimalnya Website SIMAS PUU

1. Penjelasan Perubahan

Perubahan pelaksanaan terjadi pada kegiatan 2, yaitu memperbaharui tampilan website dan menambah data base di SIMAS PUU agar lebih menarik minat masyarakat. Pada dasarnya kegiatan 2 terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- a. memperbaharui tampilan website, dan
- b. menambah data base



**Berkoordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum. (28 Mei 2018)**

kegiatan yang dihapus adalah kegiatan memperbaharui tampilan website. Hal ini disebabkan karena pada saat berkoordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Perundang-Undangan tanggal 28 Mei 2018 dan bimbingan teknis dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi tanggal 6 Juni 2018 hal tersebut kurang menjadi isu yang penting dan tampilan website simas puu masih dianggap menarik untuk saat ini. Sementara untuk kegiatan menambah data base tetap berlangsung dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rancangan aktualisasi.

Terjadi pergeseran kegiatan, yaitu pada kegiatan 3 yang sebelumnya Melakukan Koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen agar bisa melakukan sosialisasi tentang Website SIMAS PUU dipindahkan ke kegiatan 5, sedangkan kegiatan 5 yang sebelumnya Membuat email atau call center cepat tanggap dipindahkan ke kegiatan 3.

Pertukaran antara kegiatan 3 dan kegiatan 5 semata-mata dilakukan karena penulis merasa kegiatan 5 lebih baik dilakukan di akhir kegiatan, dianggap sebagai kegiatan inti dari aktualisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu terhadap pengelolaan website, sehingga setelah di sosialisasikan, apabila ada masukan-masukan dari masyarakat, maka masyarakat itu sendiri tidak bingung bagaimana cara menyampaikan masukan dan pengelola website dapat memberikan tanggapan yang cepat terhadap masukan dari masyarakat.

Perubahan kembali terjadi pada tahapan kegiatan 3 kegiatan 4 yaitu: melakukan rapat internal dengan atasan terhadap pembentukan SOP tentang pengelolaan simas puu. Hal ini dianggap tidak diperlukan lagi karena sudah terdapat buku manual tentang tata cara penggunaan simas puu oleh admin yang telah disusun oleh BDTI.

2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

a. Kegiatan 1

Kegiatan 1 peserta adalah Melakukan Pelatihan dan/atau Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) secara non formal oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI). Kegiatan bimtek telah dilakukan dengan baik dan berjalan lancar sebgaaimana yang sudah dilaksanakan di rancangan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah berkoordinasi dengan atasan telah berjalan dengan baik. Bukti persiapan, pelaksanaan dan hasil dari bimtek terdapat pada lampiran 4.1.1 sampai 4.1.4 sedangkan pada lampiran 4.1.5 adalah hasil dari kegiatan yang berupa laporan singkat (lapsing) yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai ketua rapat dan atasan dari peserta.

Dalam lampiran 4.1.1 dan 4.1.2 terlampir surat undangan dan daftar peserta untuk melaksanakan bimtek yang ditunjukan kepada koordinator bidang (korbid), mentor dan cpns di lingkungan Pusat PUU yang ditandatangani langsung oleh kepala Pusat PUU yang bertanggal 4 Juni 2018. Surat undangan ini menjadi bukti bahwa perencanaan bimtek sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam lampiran 4.1.3 terlampir surat undangan tertanggal 30 Mei 2018 untuk BDTI yang langsung ditunjukkan kepada salah satu PNS nya yaitu Erdinal Hendradjaja, S.T.,M.Sc sebagai salah satu pendiri dan pengelola dari website Pusat PUU, halaman website pusat puu dapat dikunjungi melalui pusatpuu.dpr.go.id yang salah satu menu di dalamnya adalah Simas PUU. Kegiatan mengirimkan undangan ke bagian BDTI adalah tahapan kegiatan kedua

Sedangkan tahapan kegiatan ketiga terdapat dalam lampiran 4.1.4 tergambarkan tentang suasana Bimtek yang di narasumberi oleh Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I dan Erdinal Hendradjaja, S.T.,M.Sc sebagai pendiri website Pusat PUU yang berlangsung pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 09:00-12:00 di

Ruang Rapat Kapus PUU Nomor 705. Dan lampiran 4.1.5 merupakan laporan singkat hasil bimtek sebagai bentuk pertanggungjawaban acara yang telah diselenggarakan oleh pusat PUU.

Nilai-nilai yang digunakan dalam menjalankan kegiatan 1 adalah WoG untuk berkoordinasi dengan BDTI, Manajemen ASN yang berguna bagi peningkatan kemampuan Perancang Undang-Undang (*Legal Drafter*) dalam mengolah website serta menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Selain kedua nilai itu, telah dipakai juga nilai Pelayanan Publik dalam menyelesaikan kegiatan 1 ini, hal ini ditandai dengan efektif dan efisiennya para *Legal Drafter* dalam pengoperasian website simas puu sehingga tidak memerlukan bantuan dari luar untuk hanya sekedar mengupload NA dan/atau RUU.

Kegiatan 1 ini sebenarnya sangat diperlukan mengingat tidak semua *Legal Drafter* memiliki kemampuan dasar dalam mengelola website secara baik dan benar. Apa yang terdapat dalam website sangatlah membantu para *Legal Drafter* untuk mendapatkan informasi tentang kotak para pakar, Lembaga dan mitra apabila digunakan secara baik sebagai tempat pertukaran informasi antar para *Legal Drafter*.

Manfaat dari terpecahkannya isu diatas bagi peserta adalah dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tata cara mengelola website pusat puu. Sedangkan bagi pimpinan peserta itu sendiri

“SIMAS PUU”

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DI BADAN KEAHLIAN DPR RI

Tujuan:

1. Membangun Sistem Pembentukan Undang-Undang yang Transparan, Akuntabel, Profesional, Berintegritas, Efisien dan Efektif
2. Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat secara Luas untuk Berpartisipasi dalam Penyusunan NA dan RUU
3. Meningkatkan Kinerja Badan Keahlian DPR RI dalam Penyusunan NA dan RUU
4. Meningkatkan Kualitas NA dan RUU yang Dihasilkan Badan Keahlian DPR RI

Ruang Lingkup:

1. Membangun Data Base Stakeholder
2. Penginformasian Kepada Masyarakat
3. Penyampaian Masukan Masyarakat
4. Pengolahan Masukan Masyarakat
5. Menginformasikan Tindak Lanjut Masukan Masyarakat

Dikarenakan Simas PUU merupakan hasil dari Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dari atasan peserta, dengan terpecahkannya isu diatas hal tersebut dapat membantu pimpinan peserta dalam melaksanakan program hasil Pendidikan dan pelatihannya menjadi lebih optimal. Manfaat bagi organisasi Pusat Perancangan Undang-Undang ditandai dengan mudahnya untuk mengatakan kepada komisi terkait bahwa NA dan/atau RUU yang di susun merupakan representasi dan telah mengakomodir sebanyak-banyaknya tanggapan dan keinginan masyarakat tentang sejauh apa produk yang disusun dapat dikelola.

Dampak apabila dalam memecahkan isu diatas tidak menggunakan nilai-nilai dasar PNS dapat dikatakan bahwa pemecahan isu tidak berjalan dengan maksimal. Sebagai contoh apabila dalam berkoordinasi dengan BDTI tidak menggunakan nilai WoG maka tentu akan terjadi kesalahpahaman informasi tentang jadwal pelaksanaan bahkan tempat dilakukannya

Bimtek. Contoh lainnya adalah apabila tidak menjalankan nilai-nilai Pelayanan Publik maka dalam mengelola website tidak akan terlalu efektif karena melibatkan banyak orang.

b. Kegiatan 2

Kegiatan 2 yaitu Menambah data base pakar, mitra dan lembaga terkait di SIMAS PUU agar lebih menarik minat masyarakat. Kegiatan menambah database pakar telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan time schedule yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 2-13 Juli 2018 berlangsung selama 2 minggu, kendala yang dihadapi adalah tercecernya data informasi tentang pakar sehingga menyebabkan hilangnya CV para pakar.

Setelah berkoordinasi dengan atasan dan berkoordinasi dengan BDTI perihal tata cara menambah data base pakar, peserta beserta mentor mulai mengumpulkan data-data para pakar, mitra dan Lembaga, peserta menginput sendiri data-data tersebut di halaman website. Untuk tambahan pakar yang di input ada 37 pakar yang semula hanya terdapat 50 pakar, setelah di update menjadi 87 pakar yang tersebar dari beberapa universitas (lihat lampiran 4.2.1 dan 4.2.2).

Sedangkan untuk database lembaga hanya bertambah 1 yaitu dari Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) menjadi 11 lembaga. Dan yang terakhir adalah mitra yaitu universitas dan/atau institute bertambah 6 menjadi 12 universitas dan/atau institute yang telah bekerjasama dan melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of understanding) dengan Pusat Perancangan Undang-Undang. Semuanya bisa dilihat di lampiran 4.2.3 sampai 4.2.6.

Nilai-nilai yang digunakan untuk membantu peserta dalam menyelesaikan kegiatan 2 ini adalah nilai Pelayanan Publik, karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang hal-hal dalam pembentukan suatu NA dan/atau RUU. Serta nilai Komitmen Mutu yang membantu

dalam memberikan inovasi untuk melakukan penambahan isi konten yang selama ini tidak di update.

Manfaat yang dapat didapatkan oleh peserta adalah mengetahui secara langsung tentang pakar-pakar yang telah menjadi Narasumber dalam Pembentukan suatu NA dan/atau RUU. Sedangkan bagi LD lainnya, mereka tidak perlu mencari kembali CV pakar yang sudah menjadi narasumber, cukup dengan mengakses web admin pusat puu maka akan terdapat biodata pakar secara lengkap beserta nomor yang bisa dihubungi. Sedangkan bagi masyarakat, penginformasian pakar, mitra dan Lembaga dapat meyakinkan dan menambah kepercayaan kepada Pusat PUU yang merupakan *Supporting System* DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Dampak apabila kegiatan tidak menggugurkan nilai-nilai ASN adalah tidak adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang pembentukan NA dan RUU (Pelayanan Publik) dan tidak adanya Inovasi untuk melakukan perubahan tampilan dan penambahan isi konten (Komitmen Mutu) sehingga transparansi dari Pusat PUU tidak akan terlihat secara nyata.

c. Kegiatan 3

Kegiatan 3 peserta adalah melakukan pengecekan secara berkala terhadap tanggapan dari masyarakat di website Simas PUU. Kegiatan 3 berlangsung dengan baik, untuk memudahkan kegiatan 3 ini, peserta membuat list ketua, wakil ketua dan sekretaris setiap tim NA dan/atau RUU yang sedang berjalan di Pusat PUU yang merupakan tahapan kegiatan kedua peserta. Hal ini bisa dilihat di lampiran 4.3.1 penyusunan list dimaksudkan agar pengelola website dapat dengan mudah menghubungi sekretaris atau ketua tim apabila ada tanggapan serta masukan dari masyarakat terhadap NA dan/atau RUU yang terdapat dalam Simas PUU.

Terdapat 12 NA dan/atau RUU yang sedang di susun oleh Pusat PUU, yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bidang Politik Hukum dan HAM 3 RUU, yaitu RUU Siber, RUU Penyesuaian dan RUU MD2
2. Bidang Kesejahteraan rakyat, yaitu RUU Pendidikan Keagamaan, RUU Permusikan, RUU Guru dan RUU Dosen
3. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan yaitu RUU Perikanan, RUU kehutanan, RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan RUU Energi Baru dan Terbarukan

Sedangkan untuk penyusunan rekomendasi SOP, atasan peserta menyatakan bahwa sudah cukup dengan menyertakan pedoman pengelolaan SIMAS PUU yang disusun oleh BDTI untuk memudahkan pengelola sebagaimana lampiran 4.3.2 pedoman yang disusun oleh BDTI sudah sangat jelas dan lengkap. Tahapan kegiatan ketiga peserta juga dilakukan oleh peserta secara setiap hari selama kegiatan aktualisasi ini berlangsung. Sayangnya belum ada masukan dari masyarakat terhadap penyusunan NA dan RUU di Pusat PUU.

Nilai-nilai yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan 3 ini adalah akuntabilitas Pusat PUU dalam menanggapi pernyataan, opini serta tanggapan dari masyarakat dalam penyusunan NA dan/atau RUU. Nilai lain yang digunakan adalah Komitmen Mutu, dalam menjaga penyusunan NA dan/atau RUU yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan juga quality control dari masyarakat. Pelayanan Publik yang baik ditunjukkan dengan diberikannya perhatian terhadap masukan-masukan dari masyarakat, bahkan apabila masukan-masukan tersebut dianggap penting dan memerlukan klarifikasi lanjutan, masyarakat yang menyampaikan masukan tersebut akan dipanggil ke Pusat PUU untuk mendengarkan lebih dalam tentang masukannya tersebut.

Manfaat yang didapatkan peserta setelah menyelesaikan isu ini adalah dapat mengetahui ketua, wakil ketua dan sekretaris tim RUU dan/atau NA yang sedang disusun di Pusat PUU. Manfaat lain adalah dapat mengetahui Teknik yang lebih mendalam di Buku manual penggunaan Simas PUU. Bagi Perancang, adanya buku manual Simas PUU diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam mengelola website Simas PUU dan tidak perlu lagi menghubungi BDTI apabila ada ketidakpahaman dalam mengelola website. Bagi organisasi, manfaat yang diperoleh adalah dapat lebih cepat dalam menghubungi tim apabila ada tanggapan dari masyarakat dan memaksimalkan penggunaan Simas PUU baik sebagai file sharing antar internal PUU dan bagi masyarakat secara umum.

Dampak apabila dalam menyelesaikan kegiatan diatas tidak menggunakan nilai-nilai ASN adalah tidak adanya kemauan dari LD dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat (Akuntabilitas), lambatnya menanggapi aspirasi dari masyarakat dan tidak adanya quality control dari masyarakat dalam penyusunan NA dan/atau RUU (Komitmen Mutu). Serta tidak adanya penghargaan dari LD kepada masyarakat yang sudah memberikan aspirasinya di Simas PUU (Pelayanan Publik).

d. Kegiatan 4

Kegiatan 4 peserta adalah membuat email atau call center cepat tanggap. Kegiatan 4 kembali berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Kegiatan 4 dilakukan dengan tahapan kegiatan pertama adalah dengan berkoordinasi dengan atasan peserta dan mendapatkan kesimpulan bahwa salah satu admin dapat menambahkan contact person pribadinya untuk memudahkan masyarakat dalam menghubungi pusat puu. Oleh karena itu peserta mengajukan diri untuk dapat berkontribusi bagi Pusat PUU untuk mencantumkan kontak pribadinya pada halaman website Pusat PUU (lihat lampiran 4.4.1 dan 4.4.2). Selain itu, alasan peserta mencantumkan nama peserta dalam contact

person website pusat puu adalah karena peserta merupakan salah satu admin yang ditugaskan Kepala Pusat PUU dalam mengelola website Pusat PUU (mencakup Simas PUU). Hal tersebut dapat dilihat di lampiran 4.4.3.

Dengan dimasukkannya email dan contact person peserta sebagai cepat tanggap diharapkan dapat mempercepat proses tanggapan yang diberikan oleh LD terhadap opini yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan peserta yang sudah mempunyai list ketua, wakil ketua dan sekretaris tim penyusun NA dan/atau RUU diharapkan proses penyampaian nya akan lebih cepat disampaikan dan ditindaklanjuti.

Nilai-nilai yang digunakan peserta dalam menjalankan dan memecahkan isu dalam kegiatan 4 ini adalah nilai Komitmen Mutu karena meningkatkan pelayanan dengan cara merespon tanggapan dari masyarakat secara cepat. Nilai Pelayanan Publik yang memberikan akses bagi masyarakat untuk langsung berhubungan dengan LD dan tim yang menyusun NA dan/atau RUU di Pusat PUU. Nilai Etika Publik dan Akuntabilitas ditunjukkan dengan dengan tanggungjawab Pusat PUU dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, dengan contoh memberikan informasi-informasi secara transparan mengenai kinerja yang dilaksanakan di Pusat PUU serta melibatkan masyarakat untuk bereperan aktif dalam menyampaikan masukan terhadap penyusunan NA dan/atau RUU di Pusat PUU.

Manfaat bagi peserta setelah menjalani dan memecahkan kegiatan 4 ini adalah peserta dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena lebih memudahkan dalam menyampaikan tanggapannya. Bagi organisasi Pusat PUU hal ini dapat memudahkan partisipasi masyarakat sesuai dengan fungsi dari Simas PUU itu sendiri sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan transparansi Pusat PUU.

Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai ASN dalam memecahkan isu dalam kegiatan 4 dapat mengakibatkan tidak mudahnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sehingga akan berdampak pada malas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi karena akan terbentuk stigma dari masyarakat bahwa masukan yang mereka berikan tidak akan ditindaklanjuti sebagai pertimbangan dalam penyusunan NA dan/atau RUU. Hal ini juga dapat menghambat fungsi Simas PUU yang mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegritas, efisien dan efektif di Pusat PUU.

e. Kegiatan 5

Kegiatan 5 peserta merupakan kegiatan terakhir dari agenda aktualisasi di lingkungan Pusat PUU yang beragendakan berkoordinasi dengan biro pemberitaan parlemen agar bisa melakukan sosialisasi tentang website Simas PUU. Dalam melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat, peserta Bersama mentor sepakat untuk melakukan sosialisasi via media sosial DPR RI yaitu Instagram, twitter, facebook dan website. Dengan target kaum milenial, media sosial dianggap sebagai media yang paling cepat penyebaran informasinya. Hal ini bisa dilihat dengan jumlah pengikut Instagram DPR_RI berjumlah 246.000 sedangkan di twitter akun DPR_RI memiliki pengikut berjumlah 135.100 pengikut (lihat lampiran 4.5.1 dan 4.5.2).

Dengan banyaknya pengikut dari media sosial DPR RI, kegiatan sosialisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena tersosialisasikan langsung kepada ratusan ribu masyarakat Indonesia daripada harus memuatnya ke bagian penerbitan majalah yang hanya akan dibaca oleh beberapa orang saja di lingkungan DPR RI.

Dimulainya kegiatan 5 ini ditandai dengan berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU pada tanggal 10 September 2018 dan meminta kepada peserta agar sosialisasi dilakukan dengan menggunakan metode infografis untuk lebih menarik kaum milenial yang

cenderung lebih suka melihat gambar yang ada design menarik didalamnya (lihat lampiran 4.5.3) dan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Kasubag TU Pusat PUU untuk meminta dibuatkan surat agar dapat berkoordinasi dengan Bagian Media Sosial DPR RI (lihat lampiran 4.5.4) setelah mendapatkan surat berupa Nota Dinas yang ditandatangani langsung oleh Kepala Pusat PUU (lihat lampiran 4.5.5) peserta kemudian mendatangi bagian media sosial dan bertemu langsung dengan bagian yang membuat infografis, setelah memberikan pengarahan dan penjelasan tentang maksud dan tujuan peserta melakukan sosialisasi serta memberikan materi untuk memudahkan pembuatan infografis, bagian media sosial setuju membantu peserta untuk melaksanakan kegiatan akhir ini (lihat lampiran 4.5.6).

Pembuatan infografis yang akan di unggah di media sosial DPR RI secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama menjelaskan secara singkat tentang apa itu Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (Simas PUU) dan tujuan serta fungsinya. Infografis kedua bercerita tentang panduan bagaimana tata cara menyampaikan tanggapan, masukan, atau opini terhadap penyusunan NA dan/atau RUU di Pusat PUU.

Kegiatan sosialisasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana lampiran 4.5.7 Untuk menyampaikan masukan, masyarakat dapat mengikuti 6 langkah mudah sebagaimana lampiran 4.5.8. Kegiatan 5 ini tertunda dari jadwal sebelumnya dikarenakan kesibukan dari petugas yang membuat infografis, tetapi kegiatan sosialisasi tetap berjalan dengan lancar dan hal ini meningkatkan kunjungan di website pusat puu dengan mengakses www.pusatpuu.dpr.go.id.

Nilai-nilai yang digunakan dalam menjalankan kegiatan 5 ini adalah nilai WoG yang digunakan untuk berkoordinasi dengan bagian media cetak dan media sosial. Nilai akuntabilitas yang

merupakan pertanggungjawaban Pusat PUU dalam memberikan informasi yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Nilai Pelayanan Publik digunakan untuk membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara menyampaikan pendapatnya dalam penyusunan NA dan/atau RUU di Pusat PUU.

Manfaat yang diperoleh Pusat PUU dan para LD adalah memudahkan dalam menghimpun masukan dari masyarakat secara lebih luas dan pengoptimalan website Simas PUU. Bagi peserta, berjalannya kegiatan 5 ini dapat membantu tugas sebagai pengelola website. Sedangkan bagi masyarakat, dengan adanya sosialisasi ini memudahkan untuk mengetahui bagaimana cara dalam menyampaikan masukan terhadap proses penyusunan NA dan/atau RUU di Pusat PUU.

Dampak tidak diterapkannya nilai WoG adalah koordinasi dan komunikasi antara Pusat PUU dan Bagian Media Cetak dan Media Sosial akan berjalan kurang baik dan bisa saja dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menjalankan sosialisasi Simas PUU. Hal lainnya adalah apabila tidak menjalankan nilai Pelayanan Publik, maka masyarakat akan sulit untuk dapat menyampaikan aspirasinya bahkan masyarakat tidak mengetahui bahwa ternyata aspirasinya dapat didengar dan dipertimbangkan dalam penyusunan suatu NA dan/atau RUU di Pusat PUU BK DPR RI.

3. Tantangan/Hambatan

Tantangan/Hambatan yang harus dihadapi oleh peserta dalam melaksanakan dan menyelesaikan isu diatas adalah:

a. Berkoordinasi dengan bagian diluar Badan Keahlian DPR RI

Tantangan pertama peserta dalam menjalankan kegiatan aktualisasi adalah Peserta harus berkoordinasi bagian lain yaitu Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk mengadakan bimbingan teknis tentang pengelolaan website SIMAS PUU yang

bimbingan teknis tentang pengelolaan website SIMAS PUU yang ada pada kegiatan 1. Selain BDTI, dalam kegiatan 5 peserta juga harus berkoordinasi dengan Biro pemberitaan Parlemen bagian Media Cetak dan Media Sosial dalam rangka sosialisasi website SIMAS PUU di Instagram, twitter maupun Facebook DPR RI. Peserta dihadapkan dengan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan atasan peserta untuk meminta persetujuan dan Nota Dinas yang ditandatangani atasan peserta yang ditunjukkan kepada BDTI dan BPP bagian Metaksos guna memperlancar kegiatan peserta. Bagian tersulit adalah harus bergantung kepada bagian lain diluar PUU, karena memiliki kesibukan dan tugas yang berbeda-beda serta dilakukan bersamaan dengan acara di Setjen DPR RI kegiatan 5 peserta tertunda selama 1 minggu dan waktu untuk melihat hasil sosialisasi menjadi hanya 2 hari, hal ini yang menyebabkan kurang optimalnya kegiatan 5 peserta. Ketidakefahaman antar pusat puu dan bagian lain yang diminta bekerjasama adalah hal yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peserta harus sering berkoordinasi sebelum, pada saat maupun sesudah kegiatan tersebut dilakukan agar terjadi sinergi dan hubungan yang baik antar bagian di Setjen dan BK DPR RI.

b. Biaya uang Narasumber Bimbingan Teknis

Untuk mengadakan kegiatan 1 yaitu bimbingan teknis seperti yang sudah dijelaskan diatas, diperlukan biaya untuk membayar Narasumber, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Untuk memecahkan hambatan tersebut, peserta berkoordinasi dengan mentor yang kemudian bersepakat untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan atasan tentang hal ini yaitu Kepala Pusat PUU dan Kasubag TU Pusat PUU. Setelah berkoordinasi dengan atasan, atasan peserta sangat mendukung terjadinya bimtek ini yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan SDM Pusat PUU dan CPNS Pusat PUU serta menyatakan bersedia untuk membebaskan biaya kepada Pusat PUU. Pusat PUU sangat

mendukung kegiatan yang dilakukan oleh peserta sehingga hambatan-hambatan dapat diatasi dengan baik dan lancar.

c. Tercecernya data dan *Curriculum Vitae (CV)* pakar

Pada dasarnya pemilihan pakar pendamping belumlah memiliki SOP yang jelas sehingga pemilihan pakar pendamping diserahkan kepada tim masing-masing untuk menentukan siapa pakar yang cocok untuk dapat membantu penyusunan NA dan/atau RUU. Tim pun akan bertanya dan meminta masukan kepada universitas dan/atau instansi yang sudah MoU dengan Pusat PUU untuk dapat menentukan pakar yang dapat membantu tim dalam menyusun NA dan/atau RUU.

Dengan tidak adanya SOP, data-data tentang pakar yang diberikan kepada bagian TU (Tata Usaha) hanya nama pakar, asal universitas dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya. Sedangkan CV nya akan disimpan oleh tim yang bersangkutan, dan dalam penyimpanan ini bukan tidak mungkin akan data yang hilang dan tercecer.

NAMA PAKAR PENDAMPING
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NA DAN RUU DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2018

1. BIDANG POLHUKHAM

NO	NAMA PAKAR	NPWP/No. Rek Bank	KET
RUU TENTANG PENYADAPAN			
1.	Dr. Ode Macni, SH, LL.M	NPWP: 44.416.869.4-542.000 No. Rek (Mandiri Cab UGM) : 1370005330622	Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
2.	Dr. Arisman, SH, MH	NPWP: 59.237.164.5-403.000 No. Rek (BNI Cab Depok) : 0090406991	Univ Nasional Jakarta
3.	Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum	NPWP: 09.079.722.8-121.000 No. Rek (Mandiri) : 1050003137927	Univ Sumatera Utara
4.	Prof. Ceecep Darmawan, SIP, M.Si, MH	NPWP: 09.376.462.1-424.000 No. Rek (BNI) : 0109159424	Univ Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung
5.	Prof. Ewi Danil, SH, MH	NPWP: 08.097.545.1-201.000 No. Rek (BNI) : 0079408714	Univ Andalas Padang

RUU TENTANG SMDP

Prof. Wawan Sulaiman, M.Hum	NPWP: 76.316.392.3-421.000 No. Rek	Univ Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung
Prof. Dr. Iskandarsyah, W., M.T	NPWP: 50.416.981.6-403.000 No. Rek	Univ Nasional Jakarta
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 17/2014 TENTANG MD3		
Andi Darmas, SH, M.Pd, Ph.D	NPWP No. Rek	Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
Dr. Ananda	NPWP No. Rek	PSMP UGM
Dr. Yayan Dedyah, SH, MH, M.Ag	NPWP No. Rek	Fak. Syariah & IS UIN Jakarta
Prof. Yusuf D.	NPWP No. Rek	PHI Unnes

Berikut Pakar Pendamping yang ada di Bidang Polhukam tahun 2018



BAGIAN III.
JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Terjadi pergeseran kegiatan, yaitu pada kegiatan 3 yang sebelumnya Melakukan Koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen agar bisa melakukan sosialisasi tentang Website SIMAS PUU dipindahkan ke kegiatan 5, sedangkan kegiatan 5 yang sebelumnya Membuat email atau call center cepat tanggap dipindahkan ke kegiatan 4. Sedangkan kegiatan 4 menjadi kegiatan 3.

Pertukaran antara kegiatan 3,4 dan kegiatan 5 semata-mata dilakukan karena penulis merasa kegiatan 5 lebih baik dilakukan di akhir kegiatan, karena dianggap sebagai kegiatan inti dari aktualisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu terhadap pengelolaan website, sehingga setelah di sosialisasikan, apabila ada masukan-masukan dari masyarakat, maka masyarakat itu sendiri tidak bingung bagaimana cara menyampaikan masukan dan pengelola website dapat memberikan tanggapan yang cepat terhadap masukan dari masyarakat.

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Melakukan Pelatihan dan Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) secara non formal oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)			L I B U R														
	a) berkoordinasi dengan atasan dan BDTI untuk			L														M E N Y

	mengadakan Bimtek tentang pengelolaan SIMAS PUU			E B A R A N													U S U N
	b) Berkoordinasi dengan BDTI																
	c) Melakukan bimbingan teknis																
2.	Menambah data base pakar, mitra dan lembaga di SIMAS PUU agar lebih menarik minat masyarakat																L A P O R A N A K T U
	a) Berkordinasi dengan atasan																
	b) Berkoordinasi dengan BDTI																
	c) melakukan penambahan data base Pakar, Mitra dan Lembaga																

	majalah parlementaria dan Website resmi DPR															
6.	Menyusun Laporan dan Presentasi Kegiatan Aktualisasi															



BAGIAN IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemecahan isu “Kurang Mendalamnya pemahaman tentang Pengelolaan Website Simas PUU” yaitu:

- 1) Kegiatan Ke-1 : Melakukan Pelatihan dan/atau Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) secara non formal oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) (Whole of Government (WoG), Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik)
- 2) Kegiatan Ke-2 :Menambah data base pakar, Lembaga dan mitra (Pelayanan Publik dan Komitmen Mutu)
- 3) Kegiatan Ke-3 :Melakukan pengecekan secara berkala terhadap tanggapan dari masyarakat di website Simas PUU (Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik)
- 4) Kegiatan Ke-4 : Membuat email atau call center cepat tanggap (Komitmen Mutu, Etika Publik dan Akuntabilitas)
- 5) Kegiatan Ke-5 : Berkoordinasi dengan biro pemberitaan parlemen agar bisa melakukan sosialisasi tentang website Simas PUU (Whole of Government, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik)

B. Saran dan Rekomendasi

Saran yang dapat peserta berikan dalam kegiatan Latihan Dasar CPNS Golongan III tahun 2018 yaitu:

- 1) Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan yang merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah sangat baik dalam menyelenggarakan Latsar CPNS di tahun 2018 walaupun latsar ini merupakan latsar pertama yang dilaksanakan. Hal hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki adalah tentang koordinasi antara panitia yang bertugas setiap minggu, tata tertib yang berlaku selama 30 hari kerja di kampus dan kejelasan proses

habitulasi di tempat kerja baik dari rancangan, kegiatan pelaksanaan sampai dengan laporan aktualisasi.

Menurut peserta, koordinasi antara panitia yang bertugas belum berjalan dengan optimal, hal ini bisa dilihat dari perbedaan pengaturan yang diberikan panitia di minggu pertama, kedua bahkan di minggu terakhir kegiatan on campus. Terutama dalam hal pengaturan makan dan tata cara apel yang menurut peserta sering berubah-ubah. Yang kedua adalah tata tertib, tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Pusdiklat sejatinya sudah baik tapi berjalan kurang optimal. Panitia pun tidak semuanya mengetahui mengenai tentang keseluruhan isi dari tatib tersebut. Sehingga apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak umum di jalankan maka panitia akan mendiamkan saja. Hal ini tentu menjadi preseden yang kurang baik di mata peserta dan harus di evaluasi menjadi lebih baik lagi. Terlalu ketatnya regulasi juga akan menimbulkan dan menambah pemikiran peserta yang seharusnya memiliki “hiburan” agar tidak jenuh selama pemusatan secara on campus.

Saran terakhir peserta adalah tentang rancangan, kegiatan pelaksanaan dan laporan aktualisasi adalah alangkah lebih lagi apabila Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI memiliki buku panduan yang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam menyusun rancangan aktualisasi, peserta mengalami kesulitan mencari isu yang harus diselesaikan di lingkup kerja Pusat PUU seharusnya yang harus di tekankan adalah penerapan nilai-nilai ASN bukan bentuk kegiatannya. Memang tidak ada format baku dalam penyusunan rancangan dan laporan tetapi apabila Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI memiliki bentuk baku rancangan dan laporan hal ini akan sangat membantu peserta dalam menyusun dan dapat berguna untuk keseragaman rancangan dan laporan peserta Latsar CPNS.

2) Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Untuk Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI yang merupakan Unit Kerja Peserta, saran yang dapat peserta berikan adalah para perancang harus dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan baik Simas PUU yang dapat digunakan untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat, icloud untuk kegunaan file sharing antar internal perancang, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Perlu diadakan Bimbingan Tekhnis di setiap bidang secara berkala setiap 1 tahun sekali tentang penggunaan Simas PUU dan iCloud atau yang berkaitan dengan sharing knowledge untuk peningkatan kualitas SDM dan menrefresh kembali pengetahuan tentang penggunaan hal tersebut. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi secara berkala baik melalui media sosial DPR, media cetak, dan tim Pusat PUU yang melakukan uji konsep ke daerah. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan memaksimalkan penggunaan Simas PUU.

Diperlukan juga sebuah aturan atau himbauan yang mengatur tentang kewajiban setiap tim untuk melakukan pengecekan website Simas PUU secara berkala untuk mengetahui apakah ada masukan dari masyarakat dan berapa lama waktu yang diberikan bagi tim untuk menindaklanjuti saran dari masyarakat agar masyarakat

mengetahui bahwa saran mereka dapat diterima atau belum.

Sebutkan aturan tentang tenggat waktu sangat erat kaitannya dengan nilai komitmen mutu dan pelayanan publik yang diberikan Pusat PUU serta menambah nilai positif di mata masyarakat yang kinerja Pusat PUU.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Melakukan Pelatihan dan/atau Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) secara non formal oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan atasan • Berkoordinasi dengan BDTI untuk mengadakan Bimtek non formal tentang pengelolaan SIMAS PUU • mengadakan Bimtek dengan BDTI 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan Kegiatan koordinasi • Laporan Singkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi antara Pusat PUU dengan BDTI (WOG) • Peningkatan pemahaman Perancang PUU dalam mengelola Website SIMAS PUU (Menejemen ASN). • Efektif dan Efisien dalam pengoperasian Website SIMAS PUU (PP) 	Mendukung peningkatan pemahaman Perancang dalam rangka pengoptimalan Website SIMAS PUU serta memperkuat menejemen pengetahuan perancang (partisipasi masyarakat dalam perancangan UU)	Memperkuat nilai-nilai dasar organisasi yaitu Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi, akuntabilitas dalam melayani masyarakat, dan berintegritas dalam memberikan keputusan
2.	Menambah data base pakar, mitra dan lembaga di SIMAS PUU agar lebih menarik minat masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan atasan • Berkoordinasi dengan BDTI • melakukan penambahan data base pakar, mitra dan lembaga di 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan Kegiatan • ScreenShot tampilan data base pakar, mitra dan Lembaga di website SIMAS PUU 	<ul style="list-style-type: none"> • kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang pembentukan NA dan RUU (PP) • Inovasi untuk melakukan perubahan tampilan dan 	Profesional dan akuntabel dalam memperkuat penyelenggaraan fungsi dan dukungan kinerja Perancang UU dengan membantu Partisipasi Masyarakat agar lebih	Memperkuat nilai-nilai dasar organisasi yaitu Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi, akuntabilitas dalam melayani

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		Website SIMAS PUU			memberikan masukan dan tanggapan	masyarakat (secara keseluruhan).
3.	melakukan pengecekan secara berkala terhadap tanggapan dari masyarakat di website Simas PUU	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan koordinator tim yang akan melakukan pengecekan secara berkala berkoordinasi dengan perancang yang mengelola Website melakukan pengecekan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Catatan List Koordinator Tim yang akan melakukan pengecekan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Merespon cepat tanggapan dari masyarakat terkait NA dan RUU (KM) Perhatian dan penghargaan dari tim Perancang kepada masyarakat yang memberikan saran dan masukan terhadap NA dan RUU (PP) Quality Control terhadap substansi yang dibuat oleh tim perancang uu dalam membuat NA dan RUU (KM) Tanggung Jawab perancang UU dalam merumuskan NA dan RUU (EP.AK) 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat fungsi dukungan PUU dengan Menyampaikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya secara cepat, profesional dan akuntabel guna menjadikan Pusat PUU sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian 	Memperkuat nilai-nilai dasar organisasi m menjalankan yaitu Profesional dalatugas dan fungsi, akuntabilitas dalam melayani yaitu dengan cepat memberikan tanggapan atas saran dan tanggapan dari masyarakat, dan berintegritas dalam memberikan keputusan sehingga menimbulkan modal sosial yang baik dari masyarakat.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
4.	Membuat email atau call center cepat tanggap	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi kepada atasan untuk memasukan email dan contact person admin Memasukan email admin Memasukan call center yang dapat dihubungi dengan cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> Email utama yang terhubung dengan TU Pusat PUU Pencantuman Call Center di Website SIMAS PUU 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat Merespon Cepat masukan dari masyarakat (KM) Aksesibel bagi masyarakat (PP) Tanggungjawab Pusat PUU dalam memberikan pelayanan yang optimal (EP.AK) 	Menjadikan Pusat PUU sebagai organisasi Pendukung DPR RI yang berkualitas yang ditunjukkan dengan Memudahkan aspirasi masyarakat dalam menyampaikan masukan secara tersistematis dan terstruktur terhadap penyiapan NA dan Penyiapan Penulisan RUU	Memperkuat nilai-nilai dasar organisasi yaitu Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi, akuntabilitas dalam melayani yaitu dengan melibatkan peran masyarakat secara prima
5.	Melakukan Koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen agar bisa melakukan sosialisasi tentang Website SIMAS PUU	<ul style="list-style-type: none"> mengadakan pembicaraan dengan atasan serta melakukan Koordinasi dengan Biro Pemberitaan mengirimkan informasi yang dibutuhkan tentang SIMAS 	<ul style="list-style-type: none"> catatan koordinasi antara Pusat PUU dengan Biro Pemberitaan Parlemen Informasi tentang SIMAS PUU yang dimuat di Media Sosial, Majalah 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi antara Pusat PUU dengan Biro Pemberitaan parlemen (WOG) memberikan informasi kepada masyarakat tentang Transparansi Pusat PUU dalam menjalankan Tupoksinya (AK) 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan manajemen pengetahuan dengan penginformasian yang baik kepada publik tentang rencana Penulisan NA dan draft RUU Profesional, akutabel, dan berkualitas dalam pengolahan masukan masyarakat dalam rangka 	Memperkuat nilai-nilai dasar organisasi yaitu Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi, akuntabilitas dalam melayani yaitu dengan melibatkan peran masyarakat secara prima, dan berintegritas dalam

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		PUU ke Biro Pemberitaan Parlemen penginformasian SIMAS PUU di majalah, media sosial, majalah parlementaria dan Website resmi DPR	Parlementaria, dan Website DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • pengoptimalan Pelayanan Publik (AK.PP) • memudahkan masyarakat dalam mengakses (PP) • Peran Kepala Pusat PUU untuk bertanggung Jawab kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat (AK.EP) 	Penulisan NA dan penyiapan Penulisan draft RUU sehingga mendukung fungsi legislasi DPR RI	memberikan keputusan sehingga terciptanya kepercayaan dari masyarakat.

Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	: Noval Ali Muchtar
NIP	: 19950825 201803 1 001
Unit Kerja	: Pusat Perancangan Undang-Undang
Jabatan	: Calon Perancang PUU Pertama
Isu	: Kurang Optimalnya Website SIMAS PUU

- 1) Kegiatan 1 :Melakukan Bimbingan Tekhnis oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	sudah berjalan dengan baik	Yluf
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output kegiatan bisa menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan/ yang akan dihadapi	Yluf
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Nilai pelayanan publik dan komitmen mutu kepias mas yang erat dengan memberikan akses informasi & Simas PUU	Yluf
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Kontribusi sangat besar untuk Pusat PUU, dengan adanya optimalisasi Simas PUU akan meningkatkan kinerja Pusat PUU	Yluf
Penguatan Nilai Organisasi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pusat PUU dalam penggunaan dana dan PUU	Yluf

22 Juni 2018

- 2) Kegiatan 2 : Memperbaharui tampilan website dan menambah data base di SIMAS PUU agar lebih menarik minat masyarakat

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Progress kegiatan sudah dilakuk dan berjalan dengan lancar	Yluf
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output kegiatan sudah menjawab isu dan permasalahan dengan memberikan tambahan database	Yluf
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sudah memberikan nilai pelayanan publik dan komitmen mutu kepias masyarakat	Yluf
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Penguatan kinerja Pusat PUU dengan optimalisasi website Simas PUU	Yluf
Penguatan Nilai Organisasi	Profesionalisme & akuntabilitas	Yluf

23 Agustus 2018

Lampiran 3. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Noval Ali Muchtar
NIP	:	19950825 201803 1 001
Unit Kerja	:	Pusat Perancangan Undang-Undang
Jabatan	:	Calon Perancang PUU Pertama
Isu	:	Kurang Optimalnya Website SIMAS PUU

- 1) Kegiatan 1 : Melakukan Bimbingan Tekhnis oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Telah berjalan sesuai rencana yang ditetapkan	Rabu, 4/07/2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output kes dapat mendukung pemecahan isu	Rabu, 4/07/2018
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	terkait dengan materi pelatihan WOG	Rabu, 4/07/2018
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Berkontribusi terhadap pencapaian misi	Rabu, 4/07/2018
Penguatan Nilai Organisasi	Mendukung nilai organisasi RAPI	Rabu, 4/07/2018

- 2) Kegiatan 2 : Memperbaharui tampilan website dan menambah data base di SIMAS PUU agar lebih menarik minat masyarakat

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tampilan telah diganti Sewai perencanaan	24/8-18
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	kg. Mendukung pemecahan output	24/8
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	kg. telah mendukung substansi MP	24/8-18
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	kg. berkontribusi di Tusi org	24/8-18
Penguatan Nilai Organisasi	Telah mendukung penguatan nilai	24/8-18

- 3) Kegiatan 3 : Melakukan Pengecekan secara berkala oleh setiap tim Yang menyusun NA dan RUU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Telah sesuai perencanaan	24/8-18
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Mendukung pemecahan pemecahan isu	24/8-18
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Telah Terkai	24/8-18
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Berkontribusi dalam pemecahan Tusi	24/8-18
Penguatan Nilai Organisasi	Membantu penguatan nilai organisasi	24/8-18

- 4) Kegiatan 4 : Membuat email atau call center cepat tanggap

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Berjalan sesuai rencana	24/8/18
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Berkontribusi terhadap pemecahan isu	24/8/18
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kegiatan terkait dengan substansi MP	24/8/18
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Telah mengupayakan Tusi	24/8/18
Penguatan Nilai Organisasi	Mendukung nilai organisasi	24/8/18

- 5) Kegiatan 5 : Melakukan koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen
Agar bisa melakukan Sosialisasi tentang Website SIMAS
PUU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Agar dalam	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Melaksanakan kegiatan bisa	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Berkontribusi dengan stakeholder dan agar lebih	13/9/18
Penguatan Nilai Organisasi	Bisa berkontribusi terhadap pemecahan Tusi dan nilai organisasi	

Lampiran 4 : Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan

A. Kegiatan 1



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 357 /PUU/VI/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : ---
Perihal : Undangan rapat Bimtek

Jakarta, 4 Juni 2018

Yth. 1. Para Koordibid
2. Para Mentor
3. Para Calon CPNS
Di lingkungan Pusat PUU
J a k a r t a
(nama terlampir)

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Pusat Perancangan Undang-Undang akan melakukan diskusi pakar terkait dengan Aplikasi "SIMAS PUU", yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Acara : Bimbingan Teknis Aplikasi Simas PUU Pusat PUU
Tempat : Ruang Rapat Pusat PUUBadan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI
Lantai VII Ruang 705
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada acara diskusi dimaksud

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaannya, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007 6

Lampiran 4.1.1 Surat Undangan bimtek

Nama nama Anggota Tim Bimtek

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Akhmad Aulawi, S.H., M.H.	19760627 200212 1 005	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
2	Mardisonori, S.Ag.,LLM	19770301 200212 1 005	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
3	M. Najid Ibrahim, S.Ag., M.H.	19720229 200212 1 001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
4	Zaqui Rahman, S.H., M.H.	19750617 200212 1 004	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
5	Yeni Handayani, S.H., M.H.	19810929 200212 2 004	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
6	Chairul Umam, S.H., M.H.	19751129 200212 1 002	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
7	Syintya Andini Sidi, S.H.	CPNS	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan
8	Asma Hanifah, S.H.	CPNS	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan
9	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	19890105 201801 1 002	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan
10	Dahlia Andriani, S.H.	CPNS	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan
11	Aryani Sinduningrum, S.H.	CPNS	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan
12	Noval Ali Muchtar, S.H.	19950825 201803 1 001	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan

:Lampiran 4.1.2 daftar peserta yang mengikuti Pelaksanaan Bimtek



RECEIVED NEWARK PUBLIC SAFETY
NOV 18 1963

1. Kepala Pusat-Pusat
2. Kepala Bidang Data dan Informasi
3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi

*Lampiran 4.1.3 Surat Undangan untuk Erdinal Hendradjaja, ST.,M.Sc.
sebagai Narasumber Bimtek (30 Mei 2018)*



*Lampiran 4.1.4 Pelaksanaan Bimtek di Ruang Rapat Kepala Pusat
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlangsung pada
pukul 09:00-12:00, hari Rabu, 6 Juni 2018*

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN BIMBINGAN TEKHNIS (BIMTEK)
PENGELOLAAN WEBSITE SIMAS PUU

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	:
Triwulan	:
Bimtek ke	:
Sifat	: Tertutup
Jenis bimtek	: Bimtek CPNS PUU
Hari,tanggal	: Rabu, 6 Juni 2018
Pukul	: 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI
Ketua Bimtek	: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Hadir	: orang (daftar hadir terlampir)
Acara	: Bimtek Pengelolaan SIMAS PUU

I. PENDAHULUAN

1. Bimtek pada hari Rabu 6 Juni 2018 ini dibuka pukul 09.00 WIB dengan agenda Penjelasan Pengelolaan website Pusat PUU oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) Setjen dan BK DPR RI.
2. Bimtek dinyatakan tertutup untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Perkembangan Teknologi sangat diperlukan untuk diikuti
2. Pengelolaan website Pusat PUU belum maksimal karena kesibukan para pengelola dalam menjalankan Tupoksi Utamanya

3. CPNS diberikan tugas oleh Kapus PUU untuk membantu mengelola website Pusat PUU
4. Pusat PUU akan mengirimkan BDTI Surat Permohonan agar CPNS Pusat PUU mendapatkan user untuk mengelola website Pusat PUU
5. Penjelasan dari Narasumber tentang Pengelolaan website Pusat PUU
6. File pengelolaan dalam website Pusat PUU terbagi menjadi 2, yaitu File Publik (ditampilkan di halaman website sehingga dapat terlihat oleh masyarakat) dan File Isi (hanya untuk kepentingan internal Perancang)
7. CPNS akan Menambah database Pakar, Mitra dan Lembaga yang pernah bekerjasama dengan Pusat PUU
8. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan NA dan/atau RUU melalui 3 cara, secara online (membuka website SIMAS PUU), secara offline (dapat diisi langsung di file pdf yang dibagikan) dan secara manual (melalui kertas yang dibagikan).
9. Tanggapan dari masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti oleh tim yang menyusun dan harus ada persetujuan dari Kapus PUU
10. Tanggapan dari masyarakat yang diberikan secara manual harus di input kedalam sistem website SIMAS PUU secara satu persatu kemudian dokumen tersebut di scan sebagai bukti kebenarannya.
11. CPNS PUU diberikan tugas untuk membuat buku pedoman untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan masukan atau tanggapannya.

III. KESIMPULAN

CPNS Pusat PUU diberikan tugas untuk membantu mengelola SIMAS PUU

IV. PENUTUP

Bimtek ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2018

Ketua Bimbingan Tekhnis

ttd

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007

B. Kegiatan 2

Database Pakar

Sebelumnya hanya terdapat 50 pakar:

Database Pakar		
Show: 10 entries	Search: <input type="text"/>	
Nama	Institusi	Kepakaran
Dr Chairul Huda, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	-
Dr. Achmad Sjarmidi	Institut Teknologi Bandung	Manajemen Sumber Daya Alam Hayati
dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc.	Universitas Indonesia	-
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.	Universitas Trisakti	-
Dr. Anif Sabria, S.P., M.Si	Institut Pertanian Bogor	-
Dr. Budi Riyanto S.H., M.Si	Universitas Indonesia	-
Dr. Dian Simatupang, S.H., M.H.	Universitas Indonesia	-
Dr. Edmond Makarim, S.Kom, S.H., LL.M.	Universitas Indonesia	Hukum Informasi dan Teknologi
Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Universitas Airlangga	-
Dr. Febrian, S.H., M.S.	Universitas Sinergiya	-
Showing 1 to 10 of 50 entries		
Previous 1 2 3 4 5 Next		

Lampiran 4.2.1 diambil pada tanggal 2 Juli 2018

Sesudah di tambahkan 37 pakar, maka berjumlah 87 pakar:

Database Pakar		
Show: 10 entries	Search: <input type="text"/>	
Nama	Institusi	Kepakaran
Agustina Merdekawati, SH, LL.M	Universitas Gadjah Mada	-
Andi Omiara, SH, M.Pub, Ph.D	Universitas Gadjah Mada	-
Dahliana Hasan, SH, M.Tax, Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Hukum Pajak
Dr Chairul Huda, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	-
Dr. Abdul Halim, M.A.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-
Dr. Achmad Sjarmidi	Institut Teknologi Bandung	Manajemen Sumber Daya Alam Hayati
dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc.	Universitas Indonesia	-
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.	Universitas Trisakti	-
Dr. Aminuddin Kasim, SH, MH	Universitas Tadulako	-
Dr. An Sudjito	Universitas Gadjah Mada	-
Showing 1 to 10 of 87 entries		
Previous 1 2 3 4 5 9 Next		
©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI		

Lampiran 4.2.2 diambil pada tanggal 12 Juli 2018

Database Lembaga

Sebelumnya hanya terdapat 10 lembaga:

Database Lembaga		
Show 10 entries	Search:	
Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
Asosiasi Pengusaha Indonesia	Jl. Kuningan Mula Kav. 9C, Guntur, Kecamatan Setiabudi, RT.6/RW.1, Menteng Atas, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960	
Badan Keamanan Laut	Jl. Dr. Soetomo No. 11 Jakarta 10710	
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)	Jl. Matraman Raya No. 32 B, Palmeriam, Matraman, RT.2/RW.1, Kb. Manggis, Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190	
Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia	
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur	
Lembaga Sandi Negara	Lembaga Sandi Negara Jl. Harsono RM No 70 Ragunan Ps Minggu Jakarta Selatan -12550	-
Pusat Kajian Regulasi (Center for Regulatory Research)	Kompleks Ex Timah No. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta 12670	-
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia	Puri Imperium Office Plaza UG-11-12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12960	
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)	Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720	
Yayasan WWF - Indonesia	Graha Simatupang Tower 2 Unit C Lantai 7 Jl. Letjen TB. Simatupang Kav 38 Jakarta 12540	
Showing 1 to 10 of 10 entries		Previous 1 Next

Lampiran 4.2.3 diambil pada tanggal 2 Juli 2018

Sesudah ditambahkan, maka menjadi 11 lembaga:


Database Lembaga		
Show 10 entries	Search:	
Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)	Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416	-
Asosiasi Pengusaha Indonesia	Jl. Kuningan Mula Kav. 9C, Guntur, Kecamatan Setiabudi, RT.6/RW.1, Menteng Atas, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960	
Badan Keamanan Laut	Jl. Dr. Soetomo No. 11 Jakarta 10710	
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)	Jl. Matraman Raya No. 32 B, Palmeriam, Matraman, RT.2/RW.1, Kb. Manggis, Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190	
Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia	
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur	
Lembaga Sandi Negara	Lembaga Sandi Negara Jl. Harsono RM No 70 Ragunan Ps Minggu Jakarta Selatan -12550	-
Pusat Kajian Regulasi (Center for Regulatory Research)	Kompleks Ex Timah No. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta 12670	-
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia	Puri Imperium Office Plaza UG-11-12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12960	
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)	Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720	
Showing 1 to 10 of 11 entries		Previous 1 2 Next

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Lampiran 4.2.4 diambil pada tanggal 12 Juli 2018

Database mitra

Sebelumnya hanya ada 6 universitas yang tertera:

**PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



BKD **BERANDA** **TENTANG KAMI** **PROFIL** **PRODUK** **SIMAS PUU** **GALERI** **HUBUNGI KAMI**

Database Mitra

Show 10 entries

Search:

Nama Institusi	Alamat	Tanggal MoU
Universitas Andalas	Jl. Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163	9 Februari 2017
Universitas Gajah Mada	Bulaksumur Yogyakarta 55281	22 Maret 2017
Universitas Katolik Widya Mandira	Jln. Jend. Achmad Yani No 50-52 Kupang - NTT	19 September 2017
Universitas Nasional	Jl. Sawo Mania, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520	28 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara	Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara	17 Maret 2017
Universitas Tadulako	Jl. Soekarno Hatta KM 9, Palu - Sulawesi Tengah	13 September 2017

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telp. 021-5715468 / 5715465 - Fax: 021-5715706

Lampiran 4.2.5 diambil pada tanggal 2 Juli 2018

Sesudah ditambahkan maka berjumlah total 12 universitas:

**PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



BKD **BERANDA** **TENTANG KAMI** **PROFIL** **PRODUK** **SIMAS PUU** **GALERI** **HUBUNGI KAMI**

Database Mitra

Show 10 entries

Search:

Nama Institusi	Alamat	Tanggal MoU
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gajah Mada	Karang, Malang, Jl. Sosio Yustisia, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281	24 November 2016
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah	Kampus, Jl. Ir. H. Juanda No 1, Cemp. Putih, Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412	4 Mei 2017
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati	Jalan Perjuangan, Karyamulya, Kesambi, Cirebon, Sunyaragi, Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131 Provinsi Jawa Barat	6 Oktober 2017
Institute For Development of Economics and Finance (INDEF)	ITS Tower Lt. 8 Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta, Indonesia 12510	2 November 2017
Universitas Andalas	Jl. Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163	9 Februari 2017
Universitas Gajah Mada	Bulaksumur Yogyakarta 55281	22 Maret 2017
Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)	Jalan Ciembuleuit No. 94 Hegarmanah, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat 40141	12 Oktober 2017
Universitas Katolik Widya Mandira	Jln. Jend. Achmad Yani No 50-52 Kupang - NTT	19 September 2017
Universitas Nasional	Jl. Sawo Mania, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520	28 Februari 2017
Universitas Pendidikan Indonesia	Jalan Setiabudi No. 225, Isola, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154	26 Januari 2016

Showing 1 to 10 of 12 entries

Previous 1 2 Next

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Lampiran 4.2.6 diambil pada tanggal 12 Juli 2018

C. Kegiatan 3

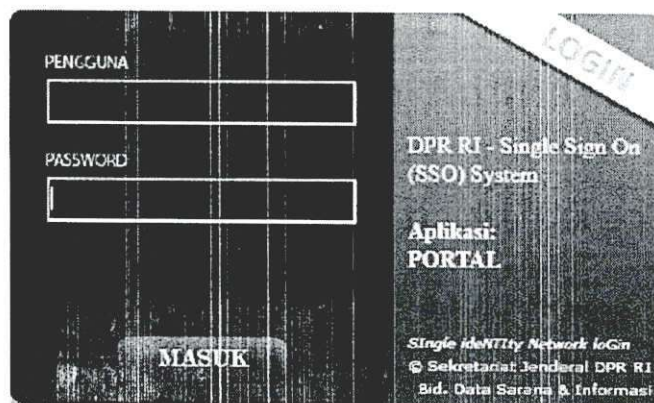
List RUU dan/NA dan ketua tim di Pusat PUU. Digunakan untuk memudahkan admin website SIMAS PUU dalam menghubungi ketua tim apabila ada masukan atau tanggapan dari msyarakat terhadap NA dan/atau RUU di Pusat PUU

NO	RUU/NA	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris
1.	RUU Siber	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM		Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H. (Sekretaris)
2.	RUU Penyadapan	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H	Yeni Handayani, S.H., M.H.	Apriyani Dewi Azis, S.H
3	RUU MD2	Mardisontori, S.Ag., LLM	Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. dan Zaqiu Rahman, S.H., M.H	Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn. dan Christina Devi Natalia, S.H.
4.	RUU Pendidikan Keagamaan	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.	Atisa Praharini, S.H., M.H	Aan Andrianih, S.H., M.H. dan Nita Ariyulinda, S.H., M.H.
5.	RUU Permusikan	Sali Susiana, S.Sos, M.Si.	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.	Nova Manda Sari, S.H., M.H., Arrista Trimaya, S.H., M.H., Ihsan Badruni Nasution, S.Sy, S.H.
6.	RUU Dosen	Ricko Wahyudi, S.H., M.H.	Bagus Prasetyo, S.H., M.H	Kuntari, S.H., M.H.
7.	RUU Guru	DR. Ujianto Singgih P., M.Si	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.	Arrista Trimaya, S.H., M.H.
8.	RUU Perikanan	Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.	Zaqiu Rahman, S.H., M.H.	Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

9.	RUU Kehutanan	Arif Usman, S.H., M.H.	Akhmad Aulawi, S.H., M.H.	Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. dan, Lucky Setyo Arybowo, S.H.
10.	RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD)	Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.		K. Zulfan Andriansyah, S.H.
11.	RUU Energi Baru Terbarukan (EBT)	Arif Usman, S.H., M.H.		M. Nurfaik, S.H.I.
12.	RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Zaqiu Rahman, S.H., M.H.		M. Nurfaik, S.H.I.

Lampiran 4.3.1 List Ketua, wakil ketua dan sekretaris tim di Pusat PUU

Buku Panduan Aplikasi
Halaman Administrasi
SIMAS PUU



Bidang Data dan Teknologi Informasi
Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI
2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. MASUK (<i>LOG IN</i>) KE PORTAL.....	3
2. KELUAR (<i>LOG OUT</i>) DARI PORTAL	4
3. MENGGANTI PASSWORD	4
4. MASUK (<i>LOG IN</i>) KE APLIKASI PUSAT PUU.....	5
5. BARIS NAVIGASI DAN KOTAK PENCARIAN.....	5
6. DAFTAR REFERENSI	6
7. DATABASE MITRA/ KELOMPOK LOBI.....	7
8. DAFTAR PERTANYAAN.....	9
9. DAFTAR RESPONDEN.....	10
10. DAFTAR PENYUSUNAN.....	11

Administrasi **SIMAS PUU** merupakan halaman administrasi Aplikasi SIMAS PUU yang terdapat pada Website Pusat PUU, yang menjadi bagian dari Aplikasi Pusat PUU yang juga merupakan halaman administrasi Website Pusat PUU.

Halaman administrasi ini mengelola berbagai database yang terdapat pada Aplikasi SIMAS PUU dan juga pengaturan kuisioner partisipasi masyarakat, mulai dari daftar pertanyaan, responden, sampai tindak lanjutnya baik untuk Naskah Akademik maupun Draf RUU.

1. Masuk (Log In) ke Portal

Sebelum masuk ke Aplikasi Pusat PUU kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam Portal Setjen DPR RI. Portal berfungsi sebagai pintu masuk tunggal aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan Setjen DPR RI.

Dengan adanya Portal, kita hanya perlu mengingat satu nama pengguna dan satu password untuk mengakses email DPR dan semua aplikasi yang diijinkan.

Untuk Sementara Portal dan Aplikasi Pusat PUU hanya dapat diakses dari dalam jaringan DPR RI.

Gunakan versi terbaru dari program penjelajah internet, kami merekomendasikan Mozilla Firefox dan Google Chrome.

Buka alamat [http:// portal.dpr.go.id/](http://portal.dpr.go.id/)

Isi kolom **Pengguna** dan **Password** lalu klik tombol

MASUK

Bila berhasil, Nama Lengkap dan Peran Anda akan tertera di kotak pada pojok kiri atas.



Erdinal Hendradjaja

Admin

[Edit My Profile](#)

2. Keluar (Log Out) dari Portal

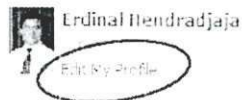
Untuk keamanan dan menghindari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya Anda selalu keluar (*logout*) setelah selesai menggunakan aplikasi ini.



Klik menu **Log out** di sebelah kanan atas untuk keluar dari portal.

3. Mengganti Password

Untuk keamanan, ada baiknya Anda mengganti password secara berkala untuk menghindari password Anda diketahui orang lain.



Klik menu **Edit My Profile** di sebelah kiri atas sehingga ada tampilan berikut di bagian bawah halaman profil Anda:

GANTI PASSWORD

Password Lama

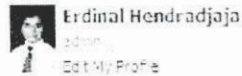
Password Baru

Konfirmasi Password Baru

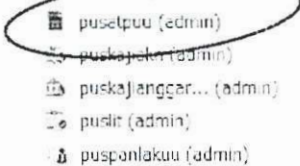
[Kembali](#)

Masukan **Password Lama** Anda pada kolom pertama dan **Password Baru** Anda pada kolom kedua dan ketiga, lalu klik tombol untuk mengganti password Anda.

4. Masuk (Log In) ke Aplikasi Pusat PUU



Aplikasi



Pada halaman utama Portal akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang dapat Anda Akses.

Klik pada logo Aplikasi Pusat PUU

Bila berhasil maka halaman depan Aplikasi Pusat PUU akan ditampilkan dan logo Portal Setjen DPR akan berganti menjadi logo **Pusat PUU Admin**.

PusatPUU Admin

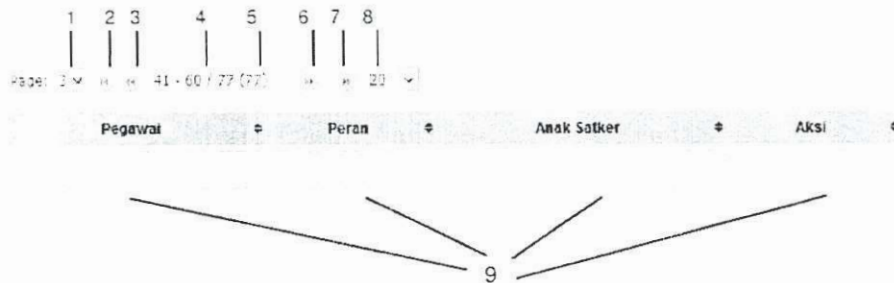
Log Out

Untuk kembali ke halaman Portal klik tombol  di pojok kanan atas.

5. Baris Navigasi dan Kotak Pencarian

Pada setiap daftar yang ditampilkan terdapat Baris Navigasi dan Kotak Pencarian yang akan membantu Anda menemukan sebuah data.

Berikut contoh Baris Navigasi dan Kotak Pencarian pada daftar Pegawai



Baris navigasi berguna untuk mempermudah tampilan data yang berjumlah banyak dengan membagi tampilan data menjadi beberapa halaman. Fungsi dari baris navigasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Halaman Ke-...

Menampilkan halaman ke-... dan untuk loncat ke halaman tertentu

2. Tombol *First*

Menuju halaman pertama

3. Tombol *Previous*

Menuju halaman sebelum

4. Data Ke-...

Menampilkan data x-y dari z data yang ditampilkan

5. Total Data

Menampilkan total jumlah data keseluruhan

6. Tombol *Next*

Menuju halaman berikut

7. Tombol *Last*

Menuju halaman terakhir

8. Data per Halaman

Menampilkan sejumlah x data pada setiap halamannya

9. Kotak Pencarian

Untuk mencari kata tertentu pada kolom tertentu di semua halaman

6. Daftar Referensi

Simas PUU

Pekerjaan
Pendidikan Terakhir
Indikator
Database Mitra
Kelompok Lobi
Pertanyaan
Responden
Penyusunan

- + Daftar Referensi terdiri dari data Pekerjaan, Pendidikan Terakhir dan Indikator. Data-data ini akan digunakan sebagai pilihan input untuk data responden dan database mitra/lembaga/tokoh serta lobbies.
- + Untuk melihat data yang telah ada, klik pada referensi yang dimaksud. Untuk menambah data , klik tombol **Tambah** disebelah kanan atas.



Daftar Pekerjaan

Tambah Pekerjaan

Page: 1 of 1 | 1-20 / 91 (91) | 20

Pekerjaan	
Bekas / Tidak Bekas	EDIT DELETE
Mengurus Rumah Tangga	EDIT DELETE
Pelajar / Mahasiswa	EDIT DELETE
Pensiunan	EDIT DELETE
Pegawai Negeri Sipil	EDIT DELETE
Tentara Nasional Indonesia	EDIT DELETE
Kepolisian RI	EDIT DELETE

Untuk mengubah atau menghapus data klik **EDIT** atau **DELETE** pada data dimaksud lalu klik tombol **Simpan**.



Edit Indikator

Back to Daftar Indikator

Indikator: Kepakaran

Status Posting: Draft

Simpan

Kembali

7. Database Mitra/ Kelompok Lobi

Menu Database Mitra digunakan untuk input data Pakar/Lembaga/ maupun Universitas Mitra. Sedangkan Menu Kelompok Lobi untuk data para lobbies.

Untuk melihat data yang telah ada, klik menu Database Mitra atau Kelompok Lobi. Untuk menambah data, klik tombol **Tambah** disebelah kanan atas.



Daftar Database Mitra

Daftar Database Mitra

Page: 1 - 1 - 20 / 56 (66)

Kategori	Nama	Institusi	Pekerjaan	Email	Telepon	Status Posting
Pakar	Dr. Edmond Mukarini, S.Kom, S.H., LL.M	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI		081514105232	Published EDIT DELETE
Pakar	Prof. Dr. Mara S.W. Sumardjono, SH, MCI, MPA	Universitas Gajah Mada	Pengajar FH UGM		0811267181	Published EDIT DELETE
Pakar	Prof. Dr. Burhanudin Jamal, S.H., M.Si	Universitas Gajah Mada	Pengajar FH UGM		0811269353 002741584142, 588348	Published EDIT DELETE

Untuk mengubah atau menghapus data klik **EDIT** atau **DELETE** pada data dimaksud lalu klik tombol **Simpan**.



Edit Database Mitra

Back to Daftar Database Mitra

Kategori:

Nama:

Institusi:

Pekerjaan:

Email:

Telepon:

Alamat:

Status Posting:

Kepublikan:

8. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan ini digunakan pada kuisioner yang akan dijawab oleh masyarakat. Setiap tahapan dapat memiliki pertanyaan yang berbeda.


Untuk melihat data yang telah ada, klik menu **Pertanyaan**. Untuk menambah data, klik tombol **Tambah** disebelah kanan atas.

 **Daftar Pertanyaan** Tambah Pertanyaan

Page: 1 - 1 - 20 / 20 (20) 20

Tahapan	No. Urut	Pertanyaan	
Rencana Penyusunan IIA	1.	Apakah yang Anda ketahui tentang peningkatan pendapatan daerah?	EDIT DELETE
Rencana Penyusunan IIA	2.	Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait peningkatan pendapatan daerah?	EDIT DELETE
Rencana Penyusunan IIA	3.	Teori dan asas/nilai apa saja yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai peningkatan pendapatan daerah?	EDIT DELETE
Rencana Penyusunan IIA	4.	Peraturan perundang-undangan apa saja yang penting untuk dihayati, diadopsi, dan diimplementasikan dengan muatan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah?	EDIT DELETE
Rencana Penyusunan IIA	5.	Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (teori, filsafat, sosiologi, dan yuris) dalam penyusunan kajian awal peningkatan pendapatan daerah?	EDIT DELETE

Untuk mengubah atau menghapus data klik **EDIT** atau **DELETE** pada data dimaksud lalu klik tombol **Simpan**.

 **Edit Pertanyaan**
Back to Daftar Pertanyaan

Tahapan : Rencana Penyusunan IIA

No. Urut : 1

Pertanyaan : Apakah yang Anda ketahui tentang peningkatan pendapatan daerah?

Simpan Kembali

9. Daftar Responden

Daftar responden adalah data masyarakat yang telah memberikan masukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuisioner.



Daftar Responden

Page: 1 1 - 1 / 1 (1) 20

Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Email	Telepon	Status Posting	
JEFFNY	31	Karyawan Swasta	Dokter	jeffnyxx@gmail.com	629111336331	Draft	EDIT DELETE

Untuk melihat data detil dari responden, klik tombol EDIT. Untuk menghapus data, klik **DELETE**.



Edit Responden

[Back to Daftar Responden](#)

Nama Responden : JEFFNY
Usia : 31
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Dokter
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : jeffnyxx@gmail.com
Telepon : 629111336331

[Kembali](#)

10. Daftar Penyusunan

Daftar penyusunan terdiri dari tahapan konsep awal dan rencana penyusunan baik naskah akademik maupun draf RUU.

Untuk melihat data yang telah ada, klik menu **Pertanyaan**. Untuk menambah data, klik tombol **Tambah** disebelah kanan atas.



Daftar Penyusunan

Tambah Penyusunan

Page: 1 1 - 8 / 8 (8) 20

Tanggal	Judul RUU	Tahapan	Status Posting	
29-09-2017	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Konsep Awal NA	Published	EDIT DELETE
09-09-2017	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Konsep Awal RUU	Published	EDIT DELETE
02-10-2017	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rencana Penyusunan NA	Published	EDIT DELETE
02-10-2017	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rencana Penyusunan RUU	Published	EDIT DELETE
20-09-2017	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Konsep Awal NA	Published	EDIT DELETE
02-10-2017	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Konsep Awal NA	Published	EDIT DELETE
02-10-2017	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Konsep Awal RUU	Published	EDIT DELETE
20-09-2017	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Konsep Awal RUU	Published	EDIT DELETE

Untuk mengubah atau menghapus data klik **EDIT** atau **DELETE** pada data dimaksud. Setiap tahapan dilengkapi dengan file pdf Naskah Akademik/ Draft RUU yang bersangkutan dan juga file kuisisioner versi cetak yang berguna bagi masyarakat untuk ikut serta memberi masukan secara offline.

Status awal setiap data penyusunan adalah 'Draft', untuk menampilkan kepada publik ganti status menjadi 'Publish'. Setelah semua data lengkap jangan lupa klik tombol **Simpan**.



Edit Penyusunan

[Back to Daftar Penyusunan](#)

Tanggal: 30-08-2017

Judul RUU: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahapan: Konsep Awal RUU

Deskripsi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang tentang Kepolisian) telah didasarkan pada paradigma baru yang menjadikan Polisi berorientasi sivil (Civilian Police), namun faktanya Polisi belum sepenuhnya mampu melakukan dan sebagai

Contact Person: Tim Penyusun MA dan PUU Bidang Polikriminal

File: ns-14.pdf (740,03 KB) [Delete]

File Kuesioner: Browse... No file selected. (Add max 2 MB)

Status Posting: Published



[Tambah Kuesioner](#)

[Tambah Susunan Tim](#)

[Kembali](#)

Di bagian bawah data akan ditampilkan data koresponden/ masyarakat yang telah memberikan masukan melalui Aplikasi SIMAS PUU pada Website Pusat PUU. Klik **EDIT** untuk melihat daftar pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan.

Kuesioner							
Susunan Tim							
Page: 1 / 1 (1) 20							
Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Email	Telepon	Status Posting	
JEREMY	31	Karyawan Swasta	Dokter	surpethelbaw@gmail.com	628111026831	UnRe	EDIT DELETE

Page: 1 1 - 5 / 5 (5) 20

Tahapan	No.	Pertanyaan	Jawaban	Status Akomodir	Keterangan Akomodir
Konsep Awal RUU	1.	Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?	ya, bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, diperlukan penguatan Role sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai UU nasional dan hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi	X	EDIT

Klik EDIT untuk memberikan komentar/ tanggapan terhadap masukan tersebut apakah dapat diakomodir atau tidak.

Setelah selesai jangan lupa klik tombol **Simpan**.



Edit Pertanyaan

[Back to Daftar Pertanyaan](#)

Tahapan : Konsep Awal RUU

No. Urut : 1 *

Pertanyaan : Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?

Jawaban : ya, bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, diperlukan penguatan Role sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai UU nasional dan hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi

Status Akomodir : Tidak Diakomodir

Keterangan Akomodir :

D. Kegiatan 4

Sebelum

PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

BKD BERANDA TENTANG KAMI PROFIL PRODUK SIMAS PUU GALERI HUBUNGI KAMI

Kontak Kami

Nama

Email

Judul

Pesan

Alamat Kantor:

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai -
Komplek MPR, DPR, DPD
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270
Tlp: 5715468 / 5715455
Fax: 5715706
e-mail: pusat_puu@dpr.go.id

Lampiran 4.4.1 (20 Agustus 2018)

setelah

PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

BKD BERANDA TENTANG KAMI PROFIL PRODUK SIMAS PUU GALERI HUBUNGI KAMI

Kontak Kami

Nama

Email

Judul

Pesan

Alamat Kantor:

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai -
Komplek MPR, DPR, DPD
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270
Tlp: 5715468 / 5715455
Fax: 5715706
e-mail: pusat_puu@dpr.go.id / novul.muhtar@dpr.go.id
Untuk SIMAS:
Tlp. 081310591114 (Nova)
e-mail: nova.muhtar@dpr.go.id

Lampiran 4.4.2 (27 Agustus 2018)



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : BK/10201/SETJEN DAN BK-DPRRI/PU/06/2018

- Menimbang : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI.
b. Untuk melaksanakan perumusan rencana strategis Pusat Perancangan Undang-Undang.
- Dasar : Kesimpulan Rapat Koordinasi Pusat Perancangan Undang-Undang dengan Bidang Data dan Informasi Teknologi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tanggal 6 Juni 2018.

Sesuai dengan Persetujuan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dengan ini menugaskan nama tersebut dibawah ini :

NO	N A M A	N I P	JABATAN
1.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	198901052018011002	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
2.	Aryani Sinduningrum, S.H.	199305292018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
3.	Shintya Andini Sidi, S.H.	199309122018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
4.	Asma' Hanifah, S.H.	199310042018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
5.	Dahlia Andnani, S.H	199407142018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
6.	Noval Aji Muchtar, S.H.	199508252018031001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan

- Untuk : Melaksanakan tugas untuk menginput data (dokumen maupun foto kegiatan Pusat Perancangan Undang-Undang) dalam website "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (SIMAS PUU).

Demikian Surat Tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Juni 2018

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

Lampiran 4.4.3 Surat Tugas yang menyatakan bahwa peserta ditugaskan untuk membantu menginput dokumen di website Pusat PUU

E. Kegiatan 5



DPR RI ✓

Akun Instagram Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semua foto adalah hasil bidikan Fotografer Media Cetak dan Media Sosial DPR RI. dpr.go.id/

Lampiran 4.5.1 Akun Instagram DPR RI (10 September 2018)



DPR RI ✓

@DPR_RI

Akun Twitter Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Official Twitter Account of The House of Representatives Republic of Indonesia

📍 Jakarta, Indonesia 🌐 dpr.go.id

0 Following 135.1K Followers

Lampiran 4.5.2 Akun Twitter DPR RI (10 September 2018)



Lampiran 4.5.3 berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU (10 September 2018)



Lampiran 4.5.4 berkoordinasi dengan Kasubag TU Pusat PUU (10 September 2018)



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 343 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 571 /PU/IX/2018

Kepada Yth. : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Dari : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Perihal : Permohonan pembuatan videografis

Dalam rangka habituasi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Perancangan Undang-Undang telah memiliki aplikasi Partisipasi Masyarakat (SIMAS) PUU.

Sehubungan dengan itu, mohon bantuan Saudara dapat melakukan pembuatan videografis yang berkaitan dengan sosialisasi SIMAS PUU ke media sosial DPR RI. Untuk kelancaran kegiatan pembuatan videografis dimaksud, kami menugaskan salah satu *Legal Drafter*, yaitu Sdr. Noval Ali Muchtar, S.H.

Besar harapan kami agar Saudara dapat membantu kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

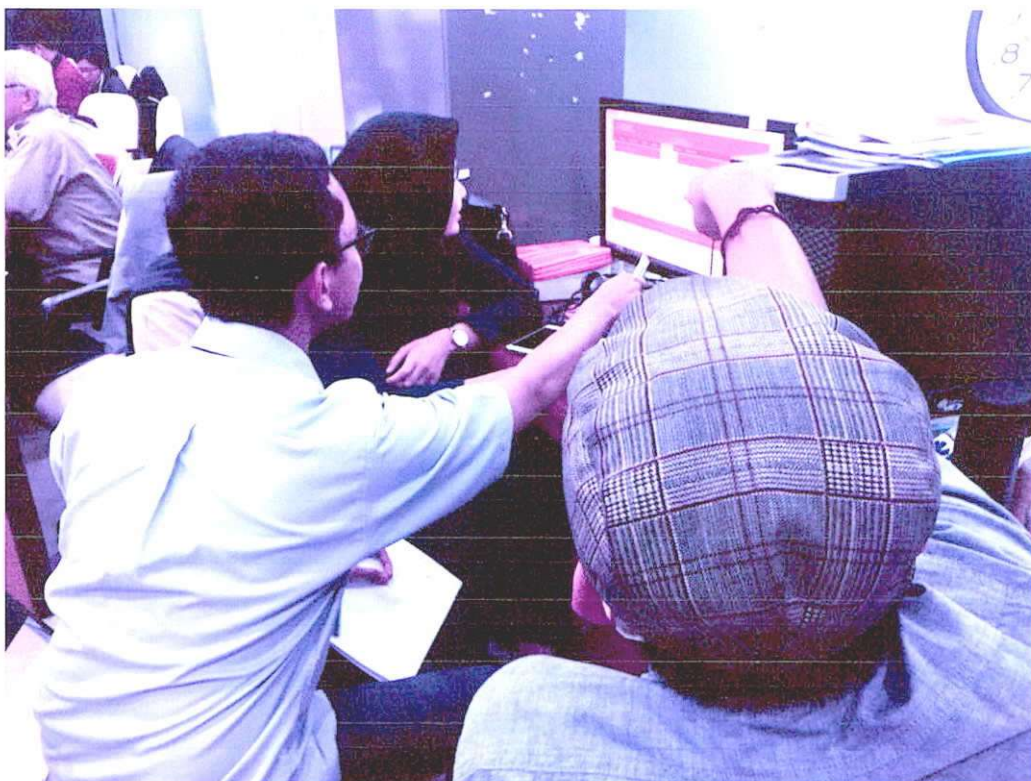
Jakarta, 10 September 2018

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650310 199003 1 007

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
2. Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website;
3. Sdr. Noval Ali Muchtar, S.H.

Lampiran 4.5.5 Nota Dinas dari Kepala Pusat PUU ke Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial untuk pembuatan infografis Sosialisasi Simas PUU



Lampiran 4.5.6 berkoordinasi dengan Bagian Media Cetak dan Media Sosial untuk Sosialisasi Simas PUU (10 September 2018)



Lampiran 4.5.7





TAHAP
2






**Pada tampilan website Pusat PUU,
Klik pada kolom "NASKAH AKADEMIK"
seperti gambar di bawah ini**





 DPR_RI
  DPR_RI
  DPR_RI
  DPR_RI

WWW.DPR.GO.ID

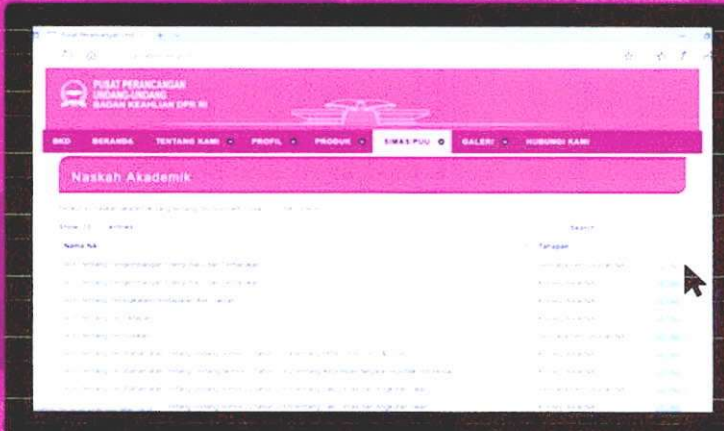






TAHAP
3





**Pada tampilan Naskah Akademik
Pilih RUU yang ingin kamu berikan masukan
Klik "DETAIL" untuk rincian NA atau RUU
lalu berikan Masukanmu!**



 DPR_RI
  DPR_RI
  DPR_RI
  DPR_RI

WWW.DPR.GO.ID

TAHAP 4

RESEPSI 2018

Pilih Download kuisisioner atau Isi kuisisioner secara online untuk memudahkan kami menghubungi

Kuisisioner

Mohon diisi:

Nama Responden	Agus Salim
Usia	25 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	S1
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Email	agussalim12.com
No. Telepon	0821xxxxxxx

DPR RI
 DPR RI
 DPR RI
 DPR RI
 [WWW.DPR.GO.ID](http://www.dpr.go.id)

TAHAP 5

RESEPSI 2018

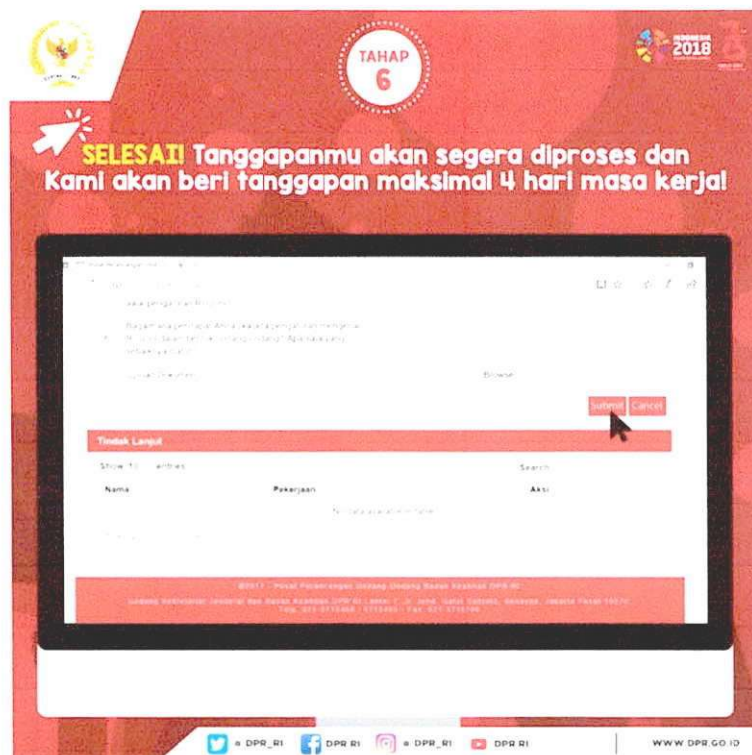
Isi dan Jawab Pertanyaan yang berisi tanggapan terhadap suatu RUU. Kamu juga bisa sertakan upload dokumen sebagai bahan pendukung tanggapanmu. Setelah itu pilih "SUBMIT"

Jawaban

No. Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Anda merasa terdampak oleh RUU yang sedang dibahas?	<input type="text"/>
2. Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat ketuntasan penyelesaian melalui pengajuan RUU ini?	<input type="text"/>
3. Menurut Anda permasalahan yang terjadi dapat dipecahkan atau belum sepenuhnya terpecahkan melalui pengajuan RUU ini?	<input type="text"/>
4. Apakah perlu ditambahkan pasal-pasal yang penting untuk RUU ini? Jika iya, apa saja? Atau jika tidak, mengapa?	<input type="text"/>
5. Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pengajuan RUU ini?	<input type="text"/>
6. Bagaimana pendapat Anda, apakah pengajuan RUU ini akan memberi dampak yang signifikan?	<input type="text"/>

Upload Dokumen

DPR RI
 DPR RI
 DPR RI
 DPR RI
 [WWW.DPR.GO.ID](http://www.dpr.go.id)



Lampiran 4.5.8 “6 cara mudah menyampaikan tanggapan di website Simas PUU” (27 September 2018)